

STRATEGI PERTAHANAN JEPANG DALAM MERESPON AGRESIVITAS MILITER TIONGKOK DI ASIA TIMUR MELALUI PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN AUSTRALIA TAHUN 2014

¹Meira Prastini, ²Sirwan Yazid Bustami, ³Kinanti Rizsa Sabilla

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

³Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

E-mail : ira.songgi@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to explain how Japan's defense strategy is dealing with China's military aggressiveness in East Asia, especially in 2014. Since 2010, China has consistently increased its military budget by 2 digits. This has certainly led to the perception of threats from East Asian countries, especially Japan, which has a background of tense relations with China. In response to the increase made by China, Japan is required to improve its defense cooperation relationship (conduct soft balancing) in addition to defense cooperation with the United States, one of which is by increasing defense cooperation with Australia. The methodology used in this paper is descriptive where this paper seeks to describe Japan's strategy in responding to China's military aggressiveness. The results of this study indicate an increase in bilateral relations between Japan and Australia in 2014 due to Japan's concerns about China's military aggressiveness.

Keywords: *Japan's defense strategy, Japan-Australia defense cooperation, Soft balancing.*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi pertahanan Jepang dalam menghadapi agresivitas militer Tiongkok di Asia Timur, khususnya di tahun 2014. Sejak tahun 2010, Tiongkok meningkatkan anggaran militernya sebesar 2 digit secara konsisten. Hal ini tentunya menimbulkan persepsi ancaman dari negara-negara Asia Timur terutama Jepang yang latar belakangnya memiliki ketegangan hubungan dengan Tiongkok. Sebagai respon atas peningkatan yang dilakukan oleh Tiongkok, Jepang diharuskan untuk meningkatkan hubungan kerjasama pertahanannya (melakukan perimbangan lunak) selain kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat, salah satunya dengan cara meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Australia. Adapun metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif dimana tulisan ini berusaha mendeskripsikan strategi Jepang dalam merespon agresivitas militer Tiongkok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hubungan bilateral antara Jepang dengan Australia di tahun 2014 yang disebabkan oleh kekhawatiran Jepang terhadap agresivitas militer Tiongkok.

Kata kunci : Strategi pertahanan Jepang, kerjasama pertahanan Jepang-Australia, *Soft balancing* (perimbangan lunak)

Pendahuluan

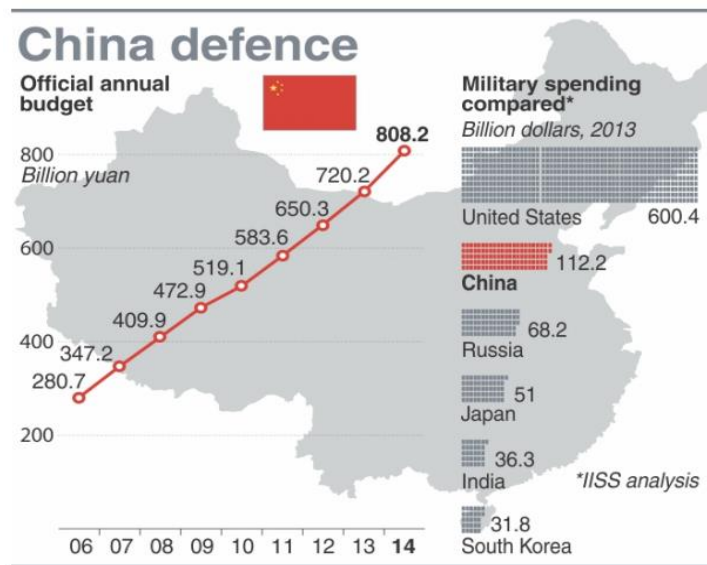
Saat ini Tiongkok adalah negara dengan perdagangan jarak jauh paling utama di dunia internasional yang dapat menjangkau sebagian besar Asia, Afrika, Timur Tengah dan Eropa. Inovasi diberbagai sektor industri telah mendominasi posisi global Tiongkok dalam bidang teknologi, navigasi dan pasar. Modernisasi yang terjadi di Tiongkok menyebabkan terjadinya pertumbuhan berkelanjutan Tiongkok di sektor manufakturnya yang juga disebabkan dari hasil investasi publik yang sangat terkonsentrasi, keuntungan tinggi, inovasi teknologi dan pasar domestik yang dilindungi. Strategi ekspor dibawah kepemimpinan Xi Jinping yang dinamis telah menciptakan surplus perdagangan yang sangat besar, yang akhirnya menjadikan Tiongkok sebagai salah satu kreditor terbesar di dunia. Untuk mempertahankan industrinya yang bersifat dinamis, Tiongkok membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah yang besar, dimana hal ini tentunya akan menghasilkan investasi luar negeri dalam skala besar. Peningkatan kekuatan ekonomi Tiongkok di dunia internasional didasarkan pada kapasitas produksi perdagangan dan investasi yang diatur oleh kebijakan tanpa campur tangan yang ketat dalam hubungan internal dengan mitra dagangnya.¹

Kebangkitan ekonomi Tiongkok tersebut pada akhirnya membawa pada peningkatan kapasitas militer baik dalam bidang anggaran militer maupun alur sistem. Pada tahun 2014, Tiongkok menduduki peringkat ke-3 dalam *Global Firepower* setelah Amerika Serikat dan Rusia.² Peningkatan ini didasarkan pada potensi dan kemampuan perang masing-masing negara di darat, di laut, dan di udara yang dilakukan dengan konvensional. Hasilnya menggabungkan nilai-nilai yang berkaitan dengan tenaga kerja, peralatan, sumber daya alam, keuangan, dan geografi yang diwakili oleh 60 lebih faktor individual yang digunakan dalam merumuskan *Global Firepower* akhir. Kemampuan Tiongkok dalam bidang militer meningkat cukup signifikan, dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok telah mengintensifkan modernisasi militernya secara signifikan dengan menambah jumlah persenjataan dan peralatan militernya. Tidak hanya itu, Tiongkok juga mereformasi militernya melalui sistem

¹ Robbins B, 'One Belt, One Road and the History of the Maritime Silk Road', *E-International Relation* (daring),2019, <https://www.e-ir.info/2017/03/26/one-belt-one-roadand-the-history-of-the-maritime-silk-route/>.

² "Military Strength Ranking", *Global Fire Power Annual Ranking*, diakses pada 10 September 2023, <https://www.globalfirepower.com>

pendidikan dan juga meningkatkan kontribusinya pada misi penjaga perdamaian. Berikut adalah grafik peningkatan anggaran militer Tiongkok sejak tahun 2006³ :



Gambar 1.1 Peningkatan Anggaran Militer Tiongkok

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa anggaran militer yang dikeluarkan oleh Tiongkok meningkat secara signifikan dari tahun 2006 hingga tahun 2014, bahkan di tahun 2014 Tiongkok menjadi negara dengan anggaran belanja militer tertinggi kedua setelah Amerika Serikat. Dengan begitu Tiongkok merupakan negara yang mengeluarkan anggaran terbesar untuk militernya di wilayah Asia Timur. Kenaikan anggaran militer ini membuat Tiongkok lebih percaya diri, Tiongkok menjadi lebih tegas dalam menghadapi tetangga-tetangganya, khususnya dalam masalah sengketa wilayah.

Pada kasus Asia Timur terlihat potensi Tiongkok sebagai kekuatan global baru di kawasan. Tiongkok di prediksi akan menunjukkan kebijakan-kebijakan luar negeri asertif dengan dukungan kapabilitas kekuatan militer dan ekonomi. Peningkatan anggaran militer Tiongkok dari tahun ke tahun tentu bukan tanpa alasan. Tiongkok membangun dan memperkuat sistem militernya sebagai bagian dari adanya kekhawatiran terhadap potensi ancaman dari negara-negara Asia-Pasifik seperti Jepang dan negara-negara lainnya. Dampak dari peningkatan anggaran militer Tiongkok tersebut menimbulkan ketegangan dalam kawasan Asia Timur. Dengan meningkatnya militer Tiongkok tersebut memunculkan berbagai potensi konflik yang akan terjadi di kawasan Asia terutama kasus sengketa wilayah

³ The Daily Star, *China Unveils Huge Military Budget* (online), diakses pada 30 juni 2023, <http://www.thedailystar.net/china-unveils-huge-military-budget-14268>.

di sejumlah perbatasan, seperti yang terjadi antara Tiongkok dengan Vietnam atas pulau Paracel yang masuk ke dalam wilayah kepulauan Sparty, di Laut China Selatan, kemudian kasus Jepang dengan Tiongkok atas wilayah atau pulau Sankakus yang menjadi salah satu bukti diharuskannya bagi negara-negara untuk meningkatkan atau memperkuat sistem pertahannya. Selain itu, persaingan yang terjadi antara Jepang, Korea Selatan, Korea Utara dan Tiongkok yang merupakan negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat besar dan memiliki pengaruh kuat dalam tatanan internasional, sehingga persaingan yang terjadi dalam kawasan sangat kompetitif di mata internasional.⁴

Situasi ini menjadi semakin mendesak bagi pemerintah Jepang sejak Tiongkok mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia tahun 2010 yang menandakan peran kepemimpinan Tiongkok dan melemahnya kepemimpinan AS dan Jepang di Asia Timur. Bagi Jepang, penggantian tatanan yang dipimpin Tiongkok merupakan tantangan strategis yang serius bagi keaman nasionalnya.⁵ Sebagai respon dari peningkatan militer Tiongkok, Jepang secara signifikan meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dikarenakan hubungannya dengan Tiongkok dapat dikatakan cukup panas. Selain itu, Jepang juga membangun hubungan kerjasama dengan beberapa negara baik di dalam maupun di luar kawasan, salah satunya dengan Australia.

Jepang membangun hubungan kerjasama dengan Australia sebagai aliansi penyeimbang kekuatan Tiongkok (*balance*). Hal ini dilakukan untuk mempererat hubungan kerjasama trilateral antara Jepang-Australia-Amerika Serikat. Pada maret, 2007 Jepang dan Australia menandatangani perjanjian *Joint Declaration on Security Cooperation*, hal ini ditunjukkan oleh penyelenggara KTT saat pertemuan menteri pertahanan dan pengesahan *Aquisition and Cross-Serving Agreement (ACSA)* dan *Information Security Agreement (ISA)*. Sekalipun deklarasi keamanan Jepang-Australia lebih rendah tingkatnya daripada persetujuan keamanan Jepang-Amerika, tetapi deklarasi tersebut dalam batas-batas besar mencerminkan kenaikan substansial taraf kerjasama kedua negara di bidang militer dan menjadi perhatian besar bagi dunia internasional. Isi utama deklarasi tersebut adalah Jepang

⁴ Adi Joko Purwanto, 'Peningkatan Anggaran Militer China dan Implikasi terhadap keamanan di Asia Timur', *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional* (daring), vol.7, no.1, 2010. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/495>

⁵ Bhubhinder Singh, 2021, p.6

dan Australia merumuskan rencana aksi tentang peningkatan kerjasama jaminan keamanan, meningkatkan dialog menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara.⁶

Jepang memilih Australia sebagai aliansi pertahannya karena Australia juga memiliki pandangan yang sama dengan Jepang mengenai persepsi terhadap Tiongkok, yakni melihat peningkatan militer Tiongkok sebagai ancaman yang serius bagi kedaulatan negaranya. Selain itu secara historis, Jepang dan Australia memiliki kedekatan yang kuat baik dari segi perdagangan maupun pertahanan. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan trilateral antara Jepang-Amerika Serikat-Australia. Dari sisi Australia, selain memiliki persepsi yang sama dengan Jepang, penandatanganan deklarasi bersama Jepang ini dilakukan mengingat Jepang merupakan mitra perdagangan terbesar bagi Australia. Selain itu, Jepang merupakan kekuatan yang cukup dominan di Pasifik.⁷

Beberapa alasan Jepang memilih Australia sebagai mitra dalam kerjasama pertahanan, pertama jika berfokus pada bidang global dan regional yang luas, Australia dengan reputasinya sebagai warga dunia yang baik dapat memberikan dukungan yang baik bagi aspirasi diplomatik Tokyo. Jepang adalah negara yang merasa sangat tidak aman, seperti yang dikatakan oleh mantan menteri pertahanan Itsunori Onodera, Jepang berada dalam “lingkungan keamanan yang semakin parah.”⁸ Salah satu tanggapan terhadap hal ini sebagai bagian dari strategi Jepang yang baru adalah membangun jaringan kemitraan keamanan baru dengan negara-negara yang berpandangan sama.⁹ Australia telah memberi simpati pada aspirasi Jepang untuk memperluas ruang diplomatiknya. Canberra telah menunjukkan dukungan yang tak tergoyahkan bagi Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menyetujui keinginan Tokyo untuk memberikan “kontribusi proaktif terhadap perdamaian”.

Kedua, kerjasama keamanan praktis telah menghasilkan keuntungan kebijakan yang konkret bagi Jepang, dalam banyak kasus yang mendukung tujuan tujuan yang lebih besar. Misalnya dalam Operasi Bantuan Pasifik, yang merupakan mitra Australia untuk Operasi Tomodachi, Pasukan Pertahanan Australia (ADF) mendukung tanggapan Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) terhadap bencana pada 11 maret. Ketiga, terdapat dorongan ideologis yang

⁶ “Joint Declaration on the Australia-Japan partnership”, *Ministry of Foreign Affairs of Japan*. http://www.mofa.go.jp/region/asiapaci/australia/join_au.html

⁷ “Joint Declaration on the Australia-Japan partnership”, *Ministry of Foreign Affairs of Japan*. http://www.mofa.go.jp/region/asiapaci/australia/join_au.html

⁸ Thomas S. Wilkins, 2015, p.105

⁹ Thomas S. Wilkins, 2015, p.107

kuat yang berfungsi untuk meningkatkan hubungan Jepang-Australia, terutama dibawah kepemimpinan Shinzo Abe. Jepang dan Australia selalu disebut sebagai mitra yang “sepemikiran” yang memiliki komitmen yang sama terhadap demokrasi, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pasar terbuka.”¹⁰

Dari pemaparan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana strategi pertahanan Jepang dalam merespon agresivitas militer Tiongkok di Asia Timur melalui peningkatan kerjasama dengan Australia tahun 2014?”

Kerangka Konseptual

Kerangka konsep ini ditujukan untuk membentuk pola pikir dan resolusi ke depan terkait dengan penelitian yang dikaji. Penggunaan konsep yang relevan dengan kajian yang dibahas merupakan sebuah kewajiban untuk menjaga kerangka ilmiah dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan konsep Kerjasama Keamanan dan konsep *Soft Balancing*.

Konsep Kerjasama Keamanan Realis

Charles E. Lindblom menjelaskan sebuah hakikat sebuah kerjasama yang diartikan sebagai sebuah proses kordinasi maupun penyesuaian kebijakan.¹¹ Sementara keamanan merujuk pada situasi atau kondisi bebas dari bahaya, ketakutan, ataupun kecemasan. Keamanan nasional mengacu pada situasi atau keadaan dimana kedaulatan, wilayah, warga negara, basis ekonomi, pemerintah dan sistem konstitusi serta nilai-nilai pokok yang dianut terjamin eksistensinya serta dapat menjalankan fungsi sesuai tujuannya tanpa adanya gangguan atau ancaman dari pihak manapun.¹² Bagi realis, militer merupakan bagian terpenting dalam pendekatan keamanan. Pandangan realis dalam melihat peran dan fungsi militer ada 4 yaitu yang pertama sebagai *Prestige Power*, dimana suatu negara menunjukkan kemampuan militernya melalui penguasaan tehnologi baru dengan daya penghancur yang dapat menggetarkan lawan. Kedua, *Detterent Power* (penangkal) dimana suatu negara meyakinkan lawannya tentang konsekuensi yang akan dihadapi apabila melakukan suatu tindakan militer yang tidak dikehendaki. Ketiga, sebagai *Defensive* dengan kata lain untuk

¹⁰ Thomas S. Wilkins, 2015, p.109

¹¹A.H. Rais & N.P.Mugasejati, Politik Kerjasama Internasional: Sebuah Pengantar, Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011, p.7-10

¹² Idjang Tjarsono, “Strategi Keamanan dalam Paradigma Realis”, *Repository Universitas Riau*, p.4, <http://repository.unri.ac.id/>

melindungi diri dari kekuatan musuh. Keempat, sebagai *Coersive Diplomacy* yaitu untuk menekan suatu negara agar mengikuti keinginan dari negara yang menekan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹³ Realis memandang bahwa obyek acuan keamanan adalah negara dan struktur sistem internasional bersifat anarkhis, sehingga suatu negara perlu mengamankan kedaulatannya dengan cara meningkatkan kekuatan militer.¹⁴

Jepang dalam dunia perpolitikan merupakan negara maju yang dikatakatan “tidak normal”, karena dipaksa untuk tidak memiliki serta mengembangkan kekuatan militer aktif yang disebabkan oleh kekalahannya dalam Perang Dunia II. Hal inilah yang mendorong Jepang melakukan upaya-upaya pembentukan kerjasama pertahanan dengan negara lain sebagai *Defensive* dan *Detterent Power*nya. Upaya ini dilakukan Jepang sebagai respon dari kekhawatirannya terhadap agresivitas militer Tiongkok. Salah satu negara yang dipilih oleh Jepang sebagai *Defensive partnernya* adalah Australia. Hal ini dikarenakan adanya hubungan erat antar kedua negara tersebut. Hubungan erat mereka terjadi karena adanya kedekatan satu sama lain dengan Amerika Serikat sebagai *Detterent Power*.

Konsep *Soft Balancing*

Robert Anthony Pape mengemukakan *Soft-Balancing* merupakan suatu tindakan untuk menyamakan peluang dalam kontes antara yang kuat dan yang lemah. Negara-negara akan seimbang ketika mereka mengambil tindakan yang dimaksudkan untuk mempersulit negara yang lebih kuat untuk menggunakan kekuatan militer mereka dalam melawan negara lain. Hal ini ditujukan untuk mencegah negara kuat menyerang atau mengurangi kemenangannya dalam perang.¹⁵ *Soft Balancing* juga dapat melibatkan pemanfaatan alat untuk membuat kekuatan militer negara yang lebih tinggi lebih sulit untuk digunakan tanpa secara langsung menghadapi kekuatan negara itu sendiri. Meskipun *Soft Balancing* bergantung pada alat non militer, namun *Soft Balancing* bertujuan untuk memiliki efek nyata pada prospek militer negara superior.

Soft balancing mencakup sebuah aliansi tertutup dengan mengembangkan perjanjian atau pemahaman tentang keamanan untuk mengimbangi negara musuh atau mengimbangi negara yang berpotensi mengancam ataupun negara *rising power*.¹⁶ *Soft balancing* juga didasarkan pada penumpukan senjata yang tertutup atau terbatas, kerjasama pelatihan militer

¹³ Idjang Tjarsono, p.5

¹⁴ Idjang Tjarsono, p.6

¹⁵ Robert A. Pape, *Soft Balancing Against the United States*, Journal of International Security, Vol.30, No.1, (2005), p.36

¹⁶ Wa Ode Siti Rahmawati Purnama, “Aplikasi *Soft Balancing* Australia Sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada Tahun 2015-2019” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019), p. 10

sementara dan kolaborasi regional atau internasional.¹⁷ Negara dalam melakukan *soft balancing* setidaknya memiliki empat bentuk strategi yang antara lain, pertama *Teritorial Denial* yang merupakan upaya untuk tidak memberikan akses teritorial kepada negara lain. Kedua, *Entangling Diplomacy* yaitu melibatkan diplomasi dimana suatu negara menyeimbangkan negara lain dengan cara diplomasi melalui perundingan multilateral. Ketiga, *Economic Strengthening* yaitu membangun blok perdagangan dalam upaya mengimbangi kekuatan negara superior. Keempat, *Signal of Resolve to Balance* yakni tekad yang kuat dengan melakukan tindakan kolektif bersama negara *second-ranked powers* untuk menjaga komitmen dalam rangka perimbangan negara superior.

Kekhawatiran Jepang akan potensi Tiongkok untuk secara serius menentang keamanan nasionalnya membuat Jepang harus memperkuat penyeimbangannya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ekspansi militer Tiongkok yang cepat dan mencakup kemampuan proyeksi kekuatan serta teknologi militer canggih, seperti kemampuan anti-akses/anti-penolakan (A2/AD). Sebagai respon, Jepang memperkuat aliansi AS-Jepang, meskipun aliansi ini merupakan tanggapan terhadap perang yang dipimpin AS melawan terorisme.¹⁸ Jepang melengkapi penguatan aliansinya dengan membentuk kemitraan keamanan dengan negara-negara demokrasi yang berpikiran sama, seperti Australia dan India. Kemitraan ini dibentuk untuk meningkatkan kerjasama keamanan di berbagai bidang, seperti kontraterorisme, keamanan non-tradisional, dan keamanan maritim.¹⁹

Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.²⁰ Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan strategi Jepang dalam merespon agresivitas militer Tiongkok. Pada kasus ini, Jepang dalam upaya untuk menjaga keamanan nasionalnya membentuk atau meningkatkan kerjasama bilateral maupun trilateralnya dengan beberapa negara baik di dalam kawasan ataupun di luar kawasan Asia Timur. Penelitian ini memfokuskan pada upaya Jepang meningkatkan kerjasama bilateralnya dengan Australia sebagai bentuk *Defensive* dari kekhawatirannya terhadap militer Tiongkok yang terus berkembang dan mengalami peningkatan.

¹⁷ Wa Ode Siti Rahmawati Purnama, 2019, p.11

¹⁸ Bhubhinder Singh, "Japan's responses to China's rise: Soft balancing in Southeast Asia", *Asian Security* (2021), p.10, <https://www.tandfonline.com/loi/fasi20>

¹⁹ Bhubhinder Singh, 2021, p.11

²⁰ Sugiyono, 2018. P.45

Hasil Dan Pembahasan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian terkait strategi Jepang dalam merespon agresivitas militer Tiongkok di Asia Timur melalui peningkatan kerjasama dengan Australia tahun 2014. Sebelum itu penulis menguraikan terlebih dahulu mengenai dinamika pertahanan dan keamanan Jepang, kemudian menguraikan sejarah terbentuknya kerjasama Jepang dengan Australia kemudian menganalisis peningkatan kerjasama pertahanan antara Jepang dan Australia sebagai respon dari agresivitas militer Tiongkok.

Dinamika Pertahanan Dan Keamanan Jepang

Jepang menyerah dan mengakui kekalahannya terhadap sekutu yang tertulis dalam *postdam declaration* tanggal 26 juli 1945 yang menyebabkan Jepang harus menerima kenyataan bahwa kekuatan militer yang dibanggakan dulu harus dilucuti oleh pasukan sekutu. Jepang harus tunduk kepada sistem Amerika Serikat dan menyetujui perjanjian aliansi keamanan yang tertulis dalam *The US-Japan Treaty Mutual Cooperation and Security* yang diratifikasi pada tahun 1951 dan berlaku sejak april 1952.²¹ Berdasarkan pasal 9 konstitusi perdamaian, Jepang diberikan hak dalam mempertahankan pemerintahan dan perlindungan warga negara dengan diizinkan untuk membentuk *Self Defense Force* (SDF) dengan syarat pasukan tersebut tidak memiliki senjata *ofensif*. Untuk masalah yang lebih serius, Jepang tetap akan bergantung kepada Amerika Serikat.²² *Self Defense Force* ini berada dibawah kendali *Civilian Defense Agency* milik Jepang yang berada dibawah naungan Perdana Menteri. *Self Defense Force* cenderung kecil, kekurangan SDM, dan kekurangan bantuan untuk melakukan operasi militer yang lebih luas. Walaupun keterlibatan Amerika Serikat dalam urusan negara Jepang ini menimbulkan pro dan kontra, Jepang tetap pada aliansinya dengan Amerika Serikat hingga sekarang yang dibuktikan dengan perpanjangan aliansi keamanan yang dilakukan pada tanggal 3 oktober 2013. Perpanjangan aliansi ini membahas tentang partisipasi Jepang dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan internasional.

Jepang dalam dunia internasional juga ikut terlibat dalam penataan keamanan internasional walaupun keterlibatannya secara menyeluruh diwakili oleh Amerika Serikat. Sejauh ini keterlibatan Jepang secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan yang

²¹ Ni Luh Bayu Purwa Eka Payani, "Perubahan kebijakan pertahanan Jepang pasca perang dingin = The change of Japan's defense policy after cold war", (Tesis, Universitas Indonesia, 2015), p.61

²² Oslan Amril, "Pasukan bela (Self Defense Force) dan masalah pertahanan Jepang : analisa kebijakan pertahanan nasional Jepang", (Tesis, Universitas Indonesia, 2005), p.60

mengarah pada pendekatan kepentingan di sektor ekonomi. Jepang menggunakan kekuatan ekonominya sebagai alat untuk membentuk atau menjalin kerjasama dengan negara-negara lain.²³ Jepang merubah kebijakan pertahanan keamanannya pada saat pasca perang dingin terlebih lagi tatanan internasional yang potensi ancamannya semakin meningkat yang dapat membahayakan keamanan nasional Jepang. Perubahan kebijakan Jepang ditandai dengan pembentukan *National Defense Program Outline* (NDPO) pada tahun 1996 sebagai batu loncatan pertama.²⁴ NDPO 1996 menyebutkan peran pertahanan Jepang di kawasan pasca Perang Dingin yang juga berisikan tentang kerjasamanya dengan Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman seperti kemungkinan adanya aktivitas agresi militer, baik terhadap Jepang maupun negara lain yang dianggap dapat menyebabkan instabilitas dalam kawasan.

Pada tahun 2004, kabinet Jepang meratifikasi *National Defense Program Guidelines* (NDPG) sebagai sebuah kebijakan pertahanan baru yang kemudian mulai dijalankan pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006, Jepang membentuk *Defense Posture Review Board* di dalam *Japan Defense Agency* (JDA) yang berisi rangkaian untuk membahas kapabilitas pertahanan Jepang sekaligus mencermati potensi ancaman terutama di kawasan Asia Pasifik. Tujuannya adalah untuk mencegah ancaman apapun yang secara langsung mncapai Jepang dengan mengusir atau meminimalisir kerusakan yang terjadi dan mengurangi kesempatan munculnya ancaman apapun di belahan dunia.²⁵ Pada era Shinzo Abe Jepang mengalami perubahan yang signifikan karena Shinzo Abe mengusulkan untuk membentuk Departemen Pertahanan sebagai peningkatan status *Japan Defense Agency* (JDA) yang akhirnya disetujui oleh Amerika Serikat. Hal ini merujuk pada konstitusi yang mengikat Jepang dimana Jepang tidak diperbolehkan memiliki pasukan militer untuk pertahanan negara dari serangan musuh. Shinzo Abe memfokuskan perubahan kebijakan ini dalam upaya meningkatkan status Badan Pertahanan Jepang menjadi sebuah kementerian penuh. Kementerian Pertahanan ini diberi wewenang untuk menentukan kebijakan keamanan dan pertahanan yang menunjang bagi Jepang.

Konteks Sejarah Kerjasama Pertahanan Jepang-Australia

²³ Irawan, Rizki & Zulkarnain, 'Kebijakan Pertahanan Jepang Terhadap Keterlibatan Self Defense Force (SDF) Dalam United Nations Peacekeeping Operations (UN-PKO)', *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, Vol.3, No.2, p.31-47

²⁴ Achmad Firdaus H., "Evaluasi Hubungan Jepang-Amerika Serikat Dari Segi Militer"(Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014), p.9

²⁵ Ministry of Defense, 2016

Jepang dan Australia merupakan dua negara yang sama-sama menjadi sekutu Amerika Serikat untuk menjaga keamanan di wilayah Asia Pasifik. Kedua negara ini memiliki sejarah kerjasama yang panjang dalam konteks multilateral seperti misi pemeliharaan perdamaian atau pembangunan lembaga regional. Pada konteks ini, hubungan diplomatik Jepang dan Australia dituang dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada bulan maret 2006, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer dan Menteri Luar Negeri Jepang Tarō Aso mendeklarasikan “kemitraan” antara Jepang dan Australia. Pada Maret 2007, Jepang dan Australia telah menandatangani perjanjian kerjasama oleh PM Australia, John Howard dan Menteri pertahanan Jepang, Fumio Kyuma.

Kerjasama pertahanan Jepang dan Australia telah tumbuh sejak kedua negara mengumumkan *Joint Declaration Security Cooperation* (JDSC) pada maret 2007. Kerjasama ini termasuk resolusi untuk isu-isu yang berkaitan dengan Korea Utara, Tiongkok, termasuk pembangunan nuklir, kegiatan misil balistik, dan isu-isu kemanusiaan. Jepang dan Australia juga mengenali ancaman perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Pasifik.²⁶Jepang dan Australia telah mulai mengadakan pertemuan yang cukup intensif (sedikitnya 24 kali pertemuan selama 2007-2012) dan pertemuan tingkat menteri. JDSC ini merupakan perjanjian keamanan pertama pasca perang yang melibatkan kolaborasi pertahanan spesifik bahwa Jepang telah menjalin kerjasama pertahanan selain dengan Amerika Serikat. Beberapa pembuat kebijakan dan pengamat (termasuk Menteri Luar Negeri Australia) telah memproyeksikan model ketiga untuk kolaborasi JDSC yaitu sebagai latihan fungsionalis untuk lebih mengkoordinasikan kerjasama Jepang-Australia dalam masalah keamanan yang lebih luas.

Setelah di deklarasikannya *Joint Declaration Security Cooperation* (JDSC), kerjasama pertahanan Jepang-Australia berkembang, hal ini ditunjukkan dengan diadakannya pertemuan puncak bilateral, konsultasi menteri luar negeri dan menteri pertahanan atau pertemuan 2 plus 2, serta ratifikasi perjanjian *Acquisition and Cross-Servicing Agreement* (ACSA) dan *Information Security Agreement* (ISA). Dengan ini, Jepang-Australia sepakat untuk mengukir bidang kerjasama baru sambil terus mengejar dan memperkuat kerjasama mereka di bidang yang ada dengan cara yang lebih efektif. Sejak 2010, Australia merupakan

²⁶ Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Joint Declaration on the Australian-Japan Partnership”, http://www.mofa.go.jp/regionasia-paci/australia/join_au.html

mitra utama Jepang untuk memperkuat hubungan bilateral. Alasannya adalah pada rekam jejak mereka dalam kerjasama praktis.²⁷

Peningkatan Kerjasama Pertahanan Jepang-Australia

Menyadari pergeseran keseimbangan kekuatan antara Tiongkok dan AS dapat mempengaruhi tanggapan Jepang terhadap kebangkitan Tiongkok. Banyak pihak yang melihat para pemimpin Tiongkok berusaha menggunakan pengaruh ekonomi dan politik untuk menghalangi dan menghambat serta menggantikan posisi Amerika Serikat di wilayah Asia dan memainkan peran lebih lanjut di level global. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan Jepang dan Australia sebagai partner dari Amerika Serikat dan mengundang aliansi AS untuk melakukan strategi *containment*.²⁸ Hubungan bilateral antara Jepang dan Australia dianggap sebagai prioritas kebijakan luar negeri Australia. Hal tersebut karena Jepang dan Australia memiliki ikatan kerjasama yang sangat kuat serta bersama-sama mengembangkan demokrasi di kawasan Asia-Pasifik. Semenjak Tiongkok menjadi negara yang memiliki pengaruh besar di Asia, Jepang dan Australia semakin mempererat hubungannya.

Pada Desember 2014, Jepang dan Australia mengadakan pertemuan tahunan keempat lembaga dialog Griffith Jepang-Australia di Tokyo, Jepang. Pertemuan ini membahas mengenai hubungan pertahanan dan keamanan Jepang-Australia yang berada di titik transformasi, mengingat tahun 2014 adalah tahun yang aktif untuk hubungan kedua negara ini. Hal yang terpenting adalah di tandatanganinya perjanjian pertahanan yang baru selama kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe pada bulan Juli 2014. Hal ini membuka pintu bagi peluang kerjasama kapal selam di Australia. Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, dan mitranya dari Jepang, Shinzo Abe, meningkatkan status hubungan bilateral menjadi 'hubungan strategis khusus'. Kedua belah pihak juga sepakat untuk mengintensifkan kerja sama teknologi pertahanan mereka, termasuk di bidang kapal selam.

Dengan adanya pertemuan puncak tahun 2014, Perdana Menteri Abbot dan Shinzo Abe menyatakan bahwa “mereka menentang setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo di Laut Tiongkok Timur dan Selatan dengan menggunakan kekuatan atau paksaan.” Selain itu, Australia juga secara lantang mengkritik upaya Tiongkok untuk menerapkan zona

²⁷ Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Joint Declaration on the Australian-Japan Partnership”, http://www.mofa.go.jp/regionasia-paci/australia/join_au.html

²⁸ Fathiya Kinarya & Feyza Raharsh Lumintosari, ‘Kepentingan Jepang Dalam Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Dengan Australia’, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol.03, No.01, tahun 2023, p.42-43

identifikasi pertahanan udara (ADIZ) diwilayah maritim yang disengketakan antara Jepang dan Tiongkok.²⁹ Pada pertemuan ini Perdana Menteri Abe menaikkan status hubungannya dengan Australia sebagai “*Special Strategic Partnership*” yang dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama alutsista dan transfer teknologi serta dibukanya peluang kerjasama kapal selam oleh Australia dan Jepang.³⁰ Status hubungan Jepang dan Australia ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dimana statusnya masih di tahap *Strategic Partnership* yang ditandai dengan adanya kesepakatan transfer informasi keamanan dari kedua negara yaitu *Information Security Agreement (ISA)*.

Pada bulan April 2014, Perdana Menteri Australia dan Jepang sepakat untuk mengembangkan kerangka kerjasama alutsista dan teknologi.³¹ Jepang akan memfasilitasi akses Australia untuk teknologi canggih dari Jepang dan memungkinkan industri pertahanan Jepang untuk memperoleh akses ke pasar yang jauh lebih besar, serta memberikan peningkatan peluang untuk industri pertahanan kedua negara. Kedua negara menandatangani perjanjian formal, kodifikasi yang berkomitmen untuk teknologi pertahanan dan melakukan penelitian yang berhubungan dengan pertahanan bersama. Hal ini juga menghasilkan pembentukan komite bersama untuk kedua negara saling melakukan transfer teknologi atau proyek-proyek yang melakukan penelitian dan pengembangan bersama. Departemen pertahanan Australia sebelumnya menyatakan minatnya untuk mendapatkan akses ke teknologi tenaga penggerak *Submarine* Jepang yang berpotensi akan menjadi manfaat yang signifikan untuk Australia.³² Jepang dan Australia termotivasi untuk mengejar kesepakatan kapal selam ini oleh keinginan bersama untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka sendiri, serta keinginan bersama untuk membuat Amerika Serikat lebih nyaman dan percaya diri dalam berkomitmen terhadap Asia-Pasifik dengan menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa mereka bersedia berbagi beban dalam mempertahankan kepentingan bersama diwilayah tersebut. dalam mendukung kesepakatan kapal selam, AS dapat membantu Jepang dengan memberikan dukungan retorik dan perlindungan diplomatik untuk ‘normalisasi’ pemerintah Abe terhadap kelompok kiri Jepang dan negara-negara tetangga yang menentanginya.

²⁹ Thomas S. Wilkins, 2015, p.113

³⁰ M. Erika Pollman & Alan Tidwell, “Australia’s Submarine Technology Cooperation With Japan as Burden-Sharing With The USA in The Asia-Pacific”, *Australian Journal of International Affairs*, Vol.69, No.4, tahun 2015, p.413

³¹ Miralda Masitha, “Implementasi Kerjasama Pertahanan Jepang-Australia (JADSC) Dalam Menjaga Kawasan Asia Pasifik 2012-2014”, (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2017), p.49

³² Miralda Masitha, 2017, p.52

Dengan dibentuknya perjanjian baru diatas, maka dapat dikatakan bahwa Jepang telah melakukan strategi penyeimbang lunak (*Soft Balancing*) dengan mengandalkan kekuatan ekonomi, diplomasi dan langkah-langkah militer terbatas untuk mengatasi kekhawatirannya terhadap kebangkitan militer Tiongkok. Bagi Jepang, kerjasama teknologi pertahanan dengan sekutu AS lainnya dapat membantu menetapkan preseden positif untuk proyek-proyek di masa depan, dan Australia dapat memperoleh kemampuan kapal selam yang dianggap perlu untuk mempertahankan wilayahnya. Ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan keamanan mereka sendiri dengan mengembangkan hubungan keamanan dengan mitra regional.

Strategi ini memungkinkan Jepang untuk mengatasi masalah strategis jangka panjangnya terkait dengan Tiongkok dalam batasan-batasan yang telah telah mengakar dalam proses pembuatan kebijakan keamanan. Strategi ini merupakan cara spesifik yang digunakan Jepang dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok. Dalam *Soft Balancing* dapat dikatakan Jepang telah melakukan langkah-langkah penyeimbangan eksternal antara kekuatan besar terhadap kekuatan dominan. Langkah-langkah atau upaya-upaya pembentukan kerjasama pertahanan Jepang dengan negara lain sebagai *Defensive* dan *Deterrent Power*nya.

Kesimpulan

Sebagai respon dari peningkatan militer Tiongkok, Jepang secara signifikan meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dikarenakan hubungannya dengan Tiongkok dapat dikatakan cukup panas. Selain itu, Jepang juga membangun hubungan kerjasama dengan beberapa negara baik di dalam maupun di luar kawasan, salah satunya dengan Australia. Jepang membangun hubungan kerjasama dengan Australia sebagai aliansi penyeimbang kekuatan Tiongkok (*balance*).

Kerjasama pertahanan Jepang dan Australia telah tumbuh sejak kedua negara mengumumkan *Joint Declaration Security Cooperation* (JDSC) pada maret 2007 yang kemudian di tingkatkan pada tahun 2014. Pada Desember 2014, Jepang dan Australia mengadakan pertemuan tahunan keempat lembaga dialog Griffith Jepang-Australia di Tokyo, Jepang. Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, dan mitranya dari Jepang, Shinzo Abe, meningkatkan status hubungan bilateral menjadi 'hubungan strategis khusus'. Kedua belah pihak juga sepakat untuk mengintensifkan kerja sama teknologi pertahanan mereka, termasuk di bidang kapal selam. Dapat disimpulkan bahwa kesepakatan ini merupakan point peningkatan kerjasama antara Jepang dan Australia, dimana tahun-tahun sebelumnya kedua

negara ini hanya membahas kerjasama mengenai berbagai bidang seperti kejahatan transnasional, kontra-terorisme, intelijen, bantuan kemanusiaan, dan perencanaan darurat.

Daftar Pustaka

Buku

A.H. Rais & N.P.Mugasejati. *Politik Kerjasama Internasional: Sebuah Pengantar*, Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi ke-27*. CV. Alfabeta: Bandung. 2018.

Jurnal

Fathiya Kinarya & Feyza Raharsh Lumintosari. ‘Kepentingan Jepang Dalam Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Dengan Australia’, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol.03, No.01 (2023), p.1-43

Idjang Tjarsono. “Strategi Keamanan dalam Paradigma Realis”, *Repository Universitas Riau*, p.1-4, <http://repository.unri.ac.id/>

Irawan, Rizki & Zulkarnain. “Kebijakan Pertahanan Jepang Terhadap Keterlibatan Self Defense Force (SDF) Dalam United Nations Peacekeeping Operations (UN-PKO)”, *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, Vol.3, No.2, p.1-47

M. Erika Pollman & Alan Tidwell. “Australia’s Submarine Technology Cooperation With Japan as Burden-Sharing With The USA in The Asia-Pacific”, *Australian Journal of International Affairs*, Vol.69, No.4, (2015) p.1-413

Pape, Robert A. “Soft Balancing Against the United States”, *Journal of International Security*” Vol.30, No.1, (2005), p.1-36

Purwanto, Adi Joko. “Peningkatan Anggaran Militer China dan Implikasi terhadap keamanan di Asia Timur”, *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, vol.7, no.1, (2010), <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/495>

Robbins B. ‘One Belt, One Road and the History of the Maritime Silk Road’, *E-International Relation* (2019) , <https://www.e-ir.info/2017/03/26/one-belt-one-roadand-the-history-of-the-maritime-silk-route/>

Singh, Bhubhinder, “Japan’s responses to China’s rise: Soft balancing in Southeast Asia”, *Asian Security* (2021), p.1-10, <https://www.tandfonline.com/loi/fasi20>

Wilkins, Thomas S. "From Strategic Partnership to Strategic Alliance?: Australia-Japan Security Ties and The Asia-Pacific", *Asia Policy*, no.20 (2015), p.1-119

Karya Ilmiah

Amril, Oslan., "Pasukan bela (Self Defense Force) dan masalah pertahanan Jepang : analisa kebijakan pertahanan nasional Jepang", Tesis, Universitas Indonesia, 2005.

Firdaus H, Achmad., "Evaluasi Hubungan Jepang-Amerika Serikat Dari Segi Militer"(Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014.

Masitha, Miralda., "Implementasi Kerjasama Pertahanan Jepang-Australia (JADSC) Dalam Menjaga Kawasan Asia Pasifik 2012-2014", Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2017.

Purnama, Wa Ode S.R., "Aplikasi *Soft Balancing* Australia Sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada Tahun 2015-2019" Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019.

Payani, Ni Luh Bayu Purwa Eka, "Perubahan kebijakan pertahanan Jepang pasca perang dingin = The change of Japan's defense policy after cold war", Tesis, Universitas Indonesia, 2015.

Website

"Joint Declaration on the Australia-Japan partnership", *Ministry of Foreign Affairs of Japan*.
http://www.mofa.go.jp/region/asiapaci/australia/join_au.html

"Military Strength Ranking", *Global Fire Power Annual Ranking*, diakses pada 10 September 2023, <https://www.globalfirepower.com>

The Daily Star, *China Unveils Huge Military Budget* (online), diakses pada 30 juni 2023, <http://www.thedailystar.net/china-unveils-huge-military-budget-14268>.